

2019



**Standar Operasional Prosedur
Kedaruratan dan Keselamatan
Gedung Pemerintah Daerah
Kota Cimahi
(Dokumen SOP - 01)**

BAB I : PENDAHULUAN

Pada suatu bangunan dapat terjadi bermacam-macam kejadian darurat yang dapat mengancam terhadap yang ada di dalam bangunan dan keamanan bangunan itu sendiri. Penghuni atau yang tinggal pada bangunan akan terkena risiko kehilangan jiwa dan harta benda, akibat keruntuhan dan lainnya. Risiko tersebut harus ditekan sekecil mungkin.

Tujuan SOP ini adalah agar potensi dampak dan kerugian akibat keadaan darurat dapat diminimalkan dan panduan ini juga dapat digunakan untuk keperluan pengelolaan bangunan dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya keadaan darurat secara fisik bangunan (mitigasi structural).

Selain itu, dengan adanya SOP ini diharapkan menjadi salah satu tolak ukur terselenggaranya perencanaan manajemen penanggulangan bencana pada Gedung Pemerintah Daerah Kota Cimahi sehingga dapat terencana dengan baik, efektif dan efisien. SOP ini juga menjadi acuan bagi stakeholder terkait yang berkepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Gedung Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing

BAB II : PENILAIAN RISIKO

II. A. Potensi Ancaman

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mendefinisikan bahwa Gempabumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempabumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan kesegala arah berupa gelombang gempabumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi.

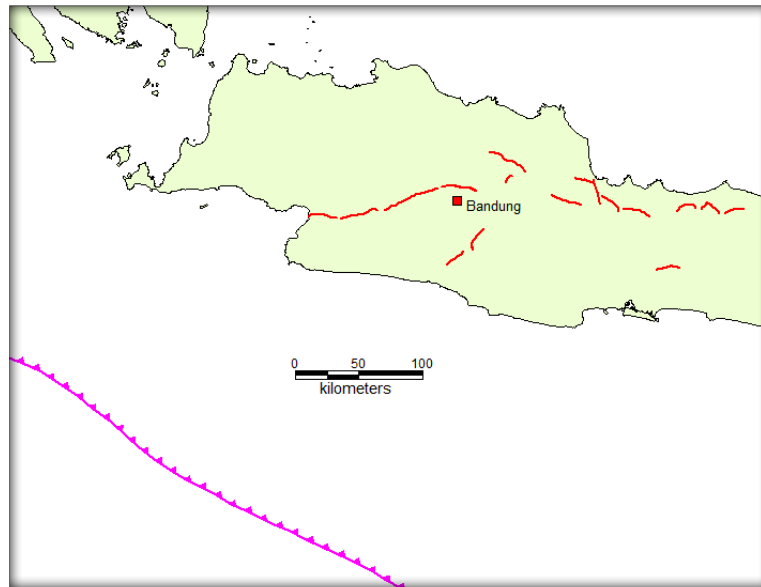
Gempabumi memiliki karakteristik berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dengan lokasi kejadian tertentu. Gempabumi memiliki potensi terulang lagi, dan belum dapat diprediksi. Meski Gempabumi akibatnya dapat menimbulkan bencana dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkannya dapat dikurangi dengan melakukan upaya Pengurangan Risiko Bencana.

Gempabumi memiliki bahaya mencakup 3 hal, yaitu:

1. Bahaya getaran gempa bumi\guncangan atau dikenal sebagai *seismic hazard*.
2. Bahaya deformasi tanah (pergeseran\retakan) di sepanjang jalur sesar aktif.

3. Bahaya ikutan (gerakan tanah, likuifaksi dan tsunami)

Berdasarkan paparan yang dikemukakan oleh Imam Catur Priambodo - Peneliti PVMBG pada penyusunan Rencana Kontinjensi Gempabumi Kota Cimahi pada bulan Desember 2018 menyebutkan bahwa sumber gempa bumi sekitar cekungan Kota Cimahi dapat terjadi dari sisi perspektif sumber gempanya dari Sesar Lembang dan Zona Subduksi.



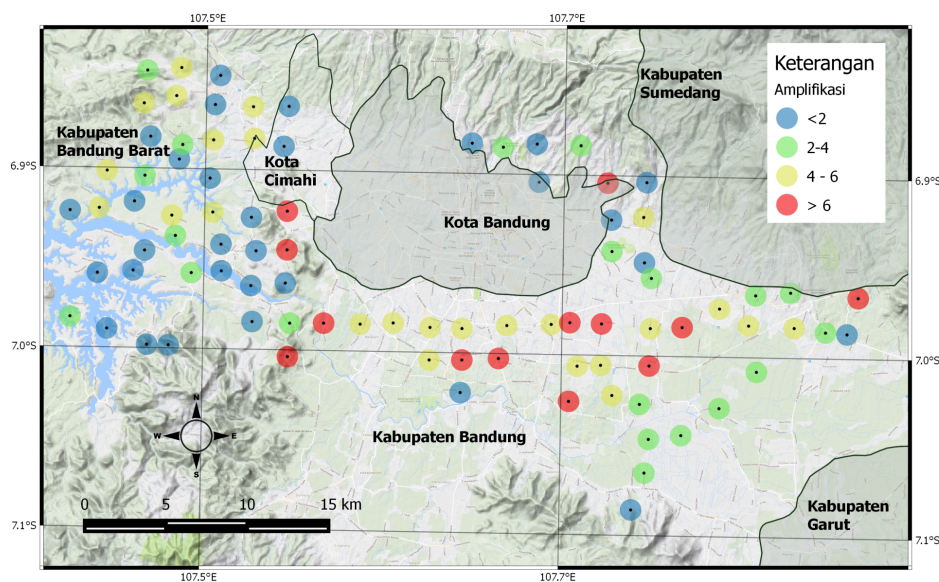
Sumber: Imam Catur, PVMBG, Desember 2018

Beberapa catatan kejadian gempa di sekitar sesar Lembang:

NO	NAMA GEMPA	TANGGAL	PUSAT GEMPA	KDLM (KM)	MAG	SKALA MMI	KERUSAKAN
1.	Lembang – Bandung	11/7/2003 07:19 WIB	6,76° LS – 107,62° BT	10	4,2 SR	III-IV	Kerusakan 1 bangunan di Desa Cihideung, Lembang. Getaran terasa di kota Bandung dan Bandung bagian timur (Cigadung, Bojong Koneng, Surapati, Suci & Cicaheum).
2.	Bandung Barat	28/8/2011 16:10 WIB	6,92° LS – 107,52° BT	10	3,3 SR	IV-V	103 rumah rusak di Kp Muril, Desa Jambudipa, Kec. Cisarua.
3.	Bandung Barat	4/9/2011 05:15 WIB	6,88° LS – 107,4° BT	10	4,5 SR	IV-V	104 rumah rusak di Desa Jambudipa, Pasir halang, Tugu Mukti, Kec. Cisarua.

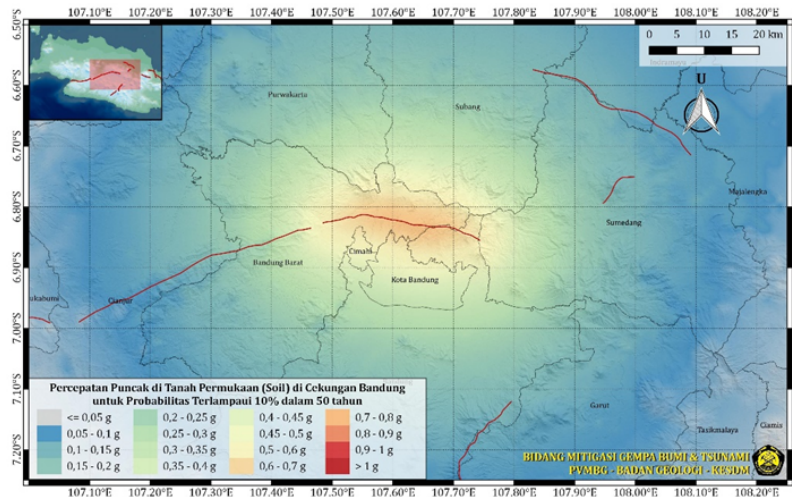
Sesar Lembang terbentang dengan panjang keseluruhan 29 km, berpotensi menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan $M 6,5 - 7,0$ dengan gerakan geser sesar pada katagori geser sinistral. Dari analisis diketahui bahwa pergeseran sungai dan stratigrafinya menunjukkan bahwa sesar lembang bergerak dengan kecepatan 3 - 5,5 mm/th. Dari hasil uji paritan menunjukkan bukti kejadian gempa bumi pada abad 15 (tahun 1450-1510).

PVMBG juga melakukan uji Microtremor di sekitar Cimahi untuk mengetahui kemungkinan rambatan dan amplifikasi dari gempabumi untuk kawasan Cimahi. Uji Mikrotremor ini di Kota Cimahi baru dilakukan di 2 titik.



Sumber : PVMBG, Desember 2018.

Dari pengujian tersebut, didapatkan analisa bahwa kawasan Kota Cimahi memiliki Percepatan Puncak pada Permukaan Tanah dari getaran Gempabumi pada 0,6 – 0,8 g dengan Amplifikasi 2 kali. Dengan Litologi jenis batuan penyusun) Tufa berbatu Apung. Maka Kota cimahi masuk pada katagori Kawasan Risiko Bencana Gempa Tinggi.



II. B. Potensi Kerentanan

Aspek kawasan :

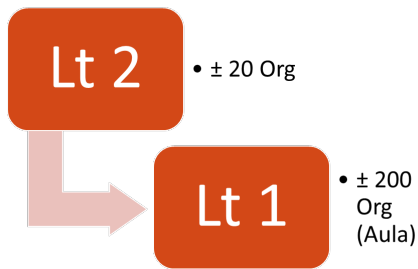
Pemerintah Daerah Kota Cimahi berada di Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Cihanjuang, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan koordinat $6^{\circ}52'14.5''\text{S}$ $107^{\circ}33'18.0''\text{E}$. Pada penyusunan SOP ini dibatasi di Gedung A, B dan C saja. Secara umum, kompleks Pemerintah Daerah Kota Cimahi berada di daerah lembah dan dibelah oleh Sungai Cimahi.

Komplek ini dibangun pada tahun 2004. Secara struktur sudah di design sekuat mungkin meski diakui oleh Dinas PUPR belum pernah dilakukan uji kekuatan gempa pada gedung-gedung yang ada. Denah dari setiap gedung termampir.

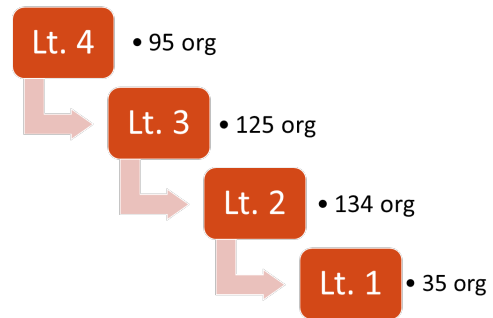
Aspek populasi :

Populasi yang ada setiap harinya di Gedung Pemerintah Daerah Kota Cimahi ini sangat padat, baik dari pegawai maupun masyarakat yang datang membutuhkan layanan. Pada survey yang dilakukan didapat angka populasi di Gedung A, B dan C sebanyak 1.212 orang perharinya.

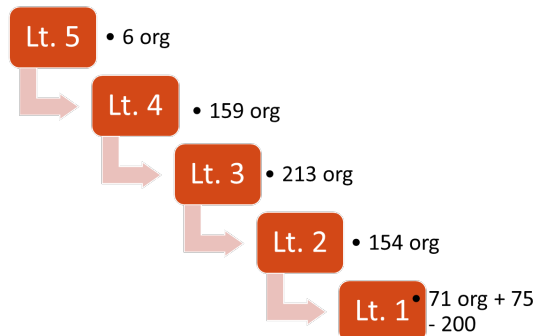
Populasi Gedung A : ± 220



Populasi Gedung B : 389



Populasi Gedung C : ± 630



Estimasi

- Pegawai : 1.012 org
- Masyarakat : 200 org
- Total estimasi setiap hari : 1.212 orang

II. C. Potensi Kapasitas

Aspek pengetahuan dan petugas:

Dari pegawai secara umum para pegawai Pemkot ketika ditanyakan tentang respon pada saat gempa dan ke mana jalur evakuasi, mereka mengeluhkan perihalan ruangan dan akses pintu keluar yang terbatas, serta tentang luas ruangan yang tidak sesuai dengan populasi pegawai yang ada. Hal ini menjadi kekhawatiran para pegawai.

Petugas Kamdal berjumlah sekitar 40 orang dengan bertugas secara rotasi. Petugas Kamdal ditempatkan di setiap Gedung dengan patrol pada setiap lantai. Pada Petugas Pamdal, beberapa pertanyaan yang ditanyakan antara lain apakah mereka mengetahui tentang SOP kedaruratan rata rata mereka menjawab baru sebagian pengetahuan tentang SOP kedaruratan dan belum memahami lebih dalam tentang jalur evakuasi, titik kumpul dan prosedurnya evakuasi.

Aspek Sarana Prasarana

Hasil survey mengenai sarana prasarana untuk tindak kedaruratan dan keselamatan yang ada di Gedung A, B dan C yaitu:

REKAP HASIL SURVEY EKSISTING RAMBU DAN SARANA PEMADAM					
GEDUNG A, B DAN C KANTOR PEMERINTAH KOTA CIMAHI					
PERIODE SURVEY : FEBRUARI 2019					
Gedung	Lt	APAR	Hidrants	Rambu Jalur Evakuasi	Keterangan
C	1	2	0	0	
C	2	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
C	3	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
C	4	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
C	5	0	0	0	
B	1	2	0	1	satu rambu di jalur kanan
B	2	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
B	3	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
B	4	8	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
A	2	2	1	0	
Jumlah		44	7	7	

II. D. Tingkat Risiko

Secara umum jika dianalisa tingkat risiko bencana di Gedung A, B dan C dengan menggunakan rumus tingkat Risiko Bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Penilaian Risiko Bencana,

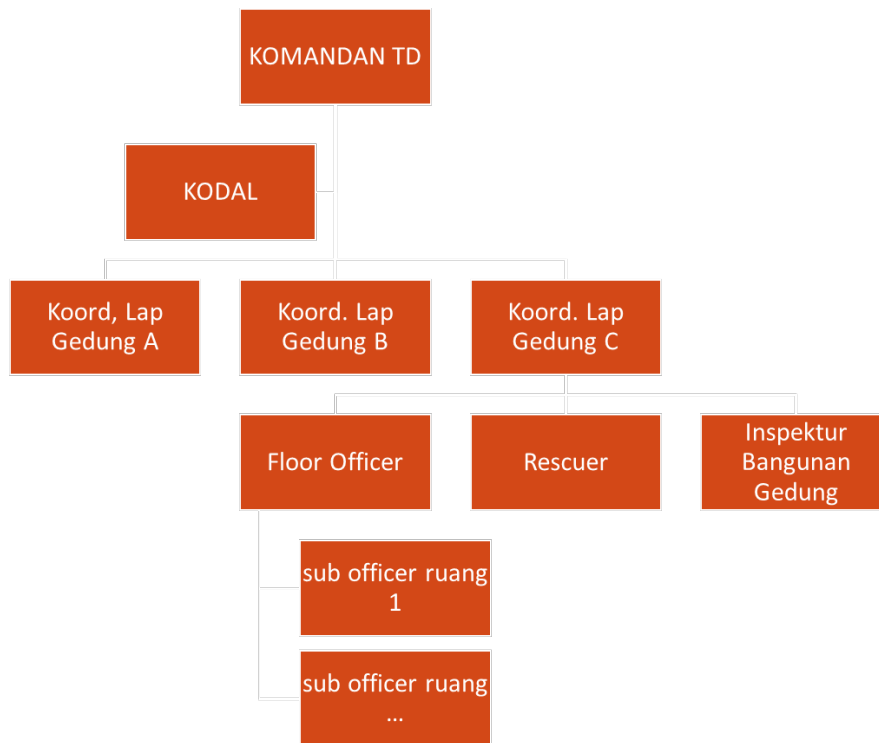
$$\text{Risiko Bencana} = \frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

maka Tingkat Risiko Bencana di Gedung A, B, dan C Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki kategori Tinggi.

Bab III: Sistem Komando Tindak Kedaruratan Kawasan

Untuk menjamin SOP ini berjalan dengan baik, terencana dan terarah maka dibuat Stuktur Komando Tindak Kedaruratan Kawasan sebagai berikut:

Komandan Tindak Kedaruratan Kawasan	: Sekda / Bag. Umum
Komandan Pengendali Lapangan	: Bag. Umum / Komandan Kamdal yang bertugas
Koordinator Lapangan Gedung A, B, C	: Danru Kamdal tiap gedung yang bertugas
Floor Officer	: Kamdal tiap lantai yang bertugas
Sub Officer	: Ditunjuk dari tiap ruang/OPD yang bertugas
Rescuer	: Satuan Kamdal dan dukungan luar
Inspektur Penilai Gedung	: Personil Dinas PUPR yang ditunjuk



Sistem Komando tersebut di atas bertugas menjalankan Prosedur Operasional Kedaruratan dan Keselamatan sebagai berikut:

NO	TINDAKAN	WAKTU	PIC
1.	Tetap Tenang dan tidak panic Lakukan upaya perlindungan Lakukan upaya perlindungan diri dengan BERJONGKOK, BERTAHAN dan LINDUNGI KEPALA (<i>DUCK, HOLD and COVER</i>);	Ketika terjadi gempa	Setiap Pegawai
2.	Petugas menerima informasi kejadian Gempa dari sumber terpercaya	menit ke 1 setelah gempa terjadi	Komandan Kamdal / Bag. Umum dan K3 Sumber informasi : BMKG / BPBD Kota Cimahi
3.	Petugas membunyikan Sirine/Fire Alarm	menit ke 2 setelah gempa terjadi	Komandan Kamdal / Bag. Umum dan K3
4.	Floor Officer mengarahkan evakuasi	menit ke 2 setelah gempa	Petugas Kamdal setiap gedung dan Floor Officer

5.	Melakukan Evakuasi ke titik kumpul dengan tertib dan tetap tenang dengan tidak lupa terus berdo'a	Menit ke 2 – 5 setelah gempa	Petugas Kamdal setiap gedung dan Floor Officer
6.	Berkumpul di titik kumpul berdasarkan satuan dinas	Menit ke 5 – 7 setelah gempa	Petugas Kamdal setiap gedung dan Floor Officer
7.	Dilakukan penghitungan pegawai	Menit ke 7 – 10 setelah gempa	Floor officer dan sub officer
8.	Sub divisi officer melaporkan jumlah personil yang kumpul pada Floor officer (lengkap/tidak)	Menit ke 10	Floor officer dan sub officer
9.	Melakukan Penyisiran dan Penilaian kerusakan gedung	Menit ke 10 – 20 setelah gempa	Petugas Kamdal, Rescue dan Inspektur Gedung (DPUPR)
10.	Tindak Evakuasi korban (Jika ada)	Menit ke 20 – 30	Petugas Kamdal dan Rescue
11.	Melaporkan kondisi (adakah korban dan tingkat kerusakan bangunan) kepada Komando Tanggap Darurat Kawasan	Menit ke 30	Petugas Kamdal, Rescue dan Inspektur Gedung (DPUPR)
12.	Pengambilan keputusan kembali ke ruangan dan beraktifitas normal kembali atau perlu melakukan tindakan lainnya	Menit ke 30 - 40	KTD = Bag. Umum dan K3 / Sekda
13.	Jika Gedung dianggap aman dapat kembali dengan tertib ke ruangan masing-masing	Menit ke 30 – 45	Petugas Kamdal, Floor Officer, Sub officer
14.	Jika Gedung dianggap tidak aman dilakukan tindakan selanjutnya		

Bab IV: Sistem Peringatan dan Rambu Evakuasi

Untuk mendukung pelaksanaan SOP ini, perlu disiapkan sarana sebagai berikut:

NO	SARANA	INDIKATOR	KEBUTUHAN MINIMAL
1.	Sirine Darurat	• Mudah diakses • Mencakup seluruh area • <i>Loud and Clear</i> • Dilakukan perawatan rutin	1 unit
2.	Fire Alarm	• Mudah diakses • Terdapat di setiap lantai • Dilakukan perawatan rutin	1 unit tiap lantai
3.	Paging	• Mudah diakses • Mencakup seluruh area • <i>Loud and Clear</i>	1 unit dengan koneksi pada setiap ruang

		• Dilakukan perawatan rutin	
4.	Megaphone	• Mudah diakses • Siap pakai • Dilakukan perawatan rutin	1 unit pada setiap gedung
5.	HT	• Mudah diakses • Jaringan baik • <i>Loud and Clear</i> • Dilakukan perawatan rutin	1 unit untuk setiap personil petugas Kedaruratan
6.	Helm Penanda	• Mudah diakses • Kuat dan ringan • Dilakukan perawatan rutin	1 unit setiap ruang
7.	Rambu Evakuasi	• Terlihat jelas • <i>Glow in the Dark</i> •	terlampir

Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Jalur evakuasi setiap gedung menggunakan tangga utara dan selatan. Setiap ruangan pada tiap-tiap lantai menuju pada tangga yang terdekat. Rambu dan penanda lainnya dibuat sesuai standar pada Perka No. 7 Tahun 2015.

Titik Kumpul berada di:

- 1) Halaman Gedung A
- 2) Lapangan Apel
- 3) Halaman Masjid
- 4) Plaza Rakyat

Bab V: Penutup

Demikian SOP ini dibuat dalam 2 bentuk dokumen yaitu SOP Dokumen – 01 yang sifatnya deskriptif dan SOP Dokumen -02 yang berbentuk matrik.

SOP ini merupakan SOP utama yang memerlukan SOP turunan yang dibuat oleh setiap OPD yang berkantor di Gedung A, B dan C.

SOP ini dapat berkembang dan dirubah sesuai kondisi. Jika terjadi kekeliruan pada SOP ini dapat ditinjau ulang.